

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT
MISKIN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DI DESA DAME KECAMATAN DOLOK MASHUL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat- Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Sumatera Utara

Oleh :

**MUHAMMAD EKO PERMANA SEPTIAN
NIM. 13144010**

Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT
MISKIN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DI DESA DAME KECAMATAN DOLOK MASIHUL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat- Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Sumatera Utara

Oleh :

**MUHAMMAD EKO PERMANA SEPTIAN
NIM. 13144010**

Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I

Pembimbing II

**H. M. IQBAL MUIN, Lc, MA
NIP.19620925199103 1 004**

**H. WAIZUL QARNI, MA
NIP.19670311199603 1 004**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/ 1439 H**

PERSETUJUAN PENGUJI SIDANG

Skripsi yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Di Desa Dame kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai” oleh Muhammad Eko Permana Septian Nim: 13144010, telah disidangkan pada tanggal 28 February 2019 dan di terima, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, Desember 2019

Penguji I

Dr. H. Muaz Tanjung, MA.
NIP: 19661019 200501 1 003

Penguji II

Dr. Hj. Fatma Yulia, MA.
NIP: 19760721 200501 2 003

Penguji III

H. M. IQBAL MUIN, Lc, MA
NIP.19620925199103 1 004

Penguji IV

H. Waizul Qarni, MA
NIP.19670311199603 1 004

Mengetahui,
An. Dekan

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. H. Muaz Tanjung, MA.
NIP: 19661019 200501 1 003

ABSTRAK

Nama : Muhammad Eko Permana Septian
NIM : 13144010
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Pembimbing I : H. M.Iqbal Muin, Lc,MA
Pembimbing II : H, Waizul Qarni, MA
Judul Skripsi : **Peran Dinas Sosial Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Srdang Bedagai**

Abstrak: Dinas sosial sebagai representasi pemerintahan di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia menjadi penyelenggara bantuan sosial dengan berdasarkan landasan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaannya. Kementerian Sosial RI memeberikan solusi berupa Pendekatan berbagai program yang mana salah satu diantaranya adalah program keluarga harapan(PKH). Salah satunya Dinas Sosial di Kabupaten Serdang Bedagai sesuai penelitian. peran dinas sosial dalam memberdayakan masyarakat miskin /kurang mampu melalui program keluarga harapan (PKH) di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan di desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, dan Bagaimana evaluasi pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris.Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan.Dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.Data yang tersaji dinalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran dinas sosial dalam memberdayakan masyarakat miskin di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai representasi asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat (Kementerian Sosial RI) kepada pemerintah daerah (Dinas Sosial) dengan fungsi perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan bantuan sosial di Kabupaten Serdang Bedagai dengan pendekatan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Kata Kunci: Peran Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai, Pemberdayaan Masyarakat Miskin, program keluarga harapan (PKH).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji sukur atas kehadiran Allah SWT. Penulis ucapkan atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi S1 pada program studi Pengembangan Masyarakat Islam.

Shalawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang mana dialah sebagai pemandu seluruh umat Islam dan dialah seorang pelopor bagi umat Islam yang selalu menjadi panutan kita. *Alhamdulillah*, Akhirnya saya selaku penulis, dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “Peran Dinas Sosial Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai”. Disamping memenuhi kewajiban sebagai seorang mahasiswa yang ingin memenuhi syarat studi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Penyusunan skripsi ini juga merupakan syarat formal untuk meraih gelar sarjana sosial. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari semua pihak yang telah banyak berperan serta dalam penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua saya : Ayahanda Usairi dan Ibunda Hidayati yang telah membesarkan dan menyekolahkan saya hingga ke perguruan tinggi, Ayah dan Ibu yang selalu membimbing, mengarahkan dan

memberikan nasehat-nasehatnya. Terima kasih untuk segala yang telah Ayah dan Ibu berikan, Semoga Ayah dan Ibu selalu mendapatkan kasih sayang dan Ridho Allah SWT, Amin Allahumma Amin.

2. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M. Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Soiman, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak H. M.Iqbal Muin,Lc,MA dan Bapak H. Waizul Qarni, MA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingannya berupa masukan, arahan dan perbaikan terhadap penulis skripsi ini.
5. Bapak Prof.Dr Abdullah, Msi, Selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan masukan, arahan serta nasehat-nasehatnya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Muaz Tanjung, MA, Sebagai Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, dan Bapak Salamuddin, MA, Sebagai Sekretaris Jurusan Pengemabngan Masyarakat Islam.
7. Segenap Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan dan mengajarkan Ilmunya.
8. Rekan-rekan Mahasiswa khususnya Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, dan teman-teman satu angkatan dari jurusan lain, seperti Hairul Diansyah, Daniyalin Siregar, Maulana, Dan lainnya yang telah banyak

memberikan bantuan dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat meningkatkan mutu pendidikan terutama dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam.

Medan, 4 Febuari 2019 M
Penulis

Mhd. Eko Permana Septian
NIM: 13144010

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan	9
G. Kajian Terdahulu	10
BAB II Landasan Teori	12
A. Teori Kesejahteraan Sosial	12
B. Pengertian Peran	14
C. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	16
D. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	18
E. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	21
F. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	23
G. Pengertian Kemiskinan.....	24

H. Konsep Kemiskinan.....	25
I. Indikator Kemiskinan	27
J. Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan	29
K. PKH.....	30
1. Pengertian PKH (Program Keluarga Harapan)	30
2. Manfaat PKH	31
3. Tujuan PKH	32
4. Penyaluran Dana PKH	33
5. Komponen PKH	34
6. Lembaga Pendukung PKH	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Sumber Data	37
1. Data Primer	37
2. Data Sekunder	37
D. Informan Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
1. Wawancara	39
2. Observasi	39

3. Dokumentasi	39
F. Teknik Analisis Data Dan Keabsahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	42
A. Peran dinas sosial dalam memberdayakan masyarakat miskin di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.....	42
B. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan di desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai	47
C. Evaluasi pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.....	59
BAB V Penutup	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang sosial masyarakat dibawah naungan Kementrian Sosial Republik Indonesia. Unsur pelaksana ini memiliki kewenangan tersendiri dalam mengenai berbagai bidang sosial yang salah satunya adalah menangani masalah kemiskinan di masyarakat. Dinas Sosial di Daerah Kabupaten/Kota disebut dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang kewenangan nya mengenai permasalahan di daerah Kabupaten/Kota tersebut salah satunya adalah Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai.

Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana Dinas Sosial di daerah lainnya yang mana memiliki program, salah satu diantaranya adalah PKH (Program Keluarga Harapan) yang mana program ini di bentuk oleh Kementrian Sosial dan berada dibawah naungan Dinas Sosial sebagai salah satu program yang dijalankan untuk mengurangi tingkat kemiskinan sebagai penyakit sosial yang ada di tengah tengah masyarakat.seperti membuat Pelatihan dan Bimbingan Teknis membentuk suatu usaha, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Hakekatnya adalah upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diperjelas dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan kemerdekaan yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. . Kemiskinan merupakan salah satu dampak negatif dari pembangunan fisik dan sumber daya

manusia (SDM). Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan perubahan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Secara umum, kemiskinan adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang atau kelompok masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Angka statistik memberi informasi dan masih banyak jumlah penduduk miskin.

Kemisikinan merupakan masalah utama negara yang sedang membangun termasuk negara Indonesia, dimana penanggulangannya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, kreatif, komprehensif dan berkesinambungan. Permasalahan kemiskinan yang masih merupakan agenda serius yang dihadapi dan ditanggulangi oleh wilayah perkotaan. Masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa dan negara serta membutuhkan kerja keras yang terorganisasi untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Di Indonesia, pentingnya peran negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan publik di bidang kesejahteraan rakyat dilandasi oleh prespektif historis, idiologis, logis dan universal.

Terjadinya kemiskinan dan masalah sosial dikarenakan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Kemudian faktor eksternal yaitu kebijakan publik yang belum berpihak kepada masyarakat miskin, tidak tersedinya pelayanan sosial dasar, kesenjangan, dan ketidakadilan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang mendasar dan sangatlah banyak dampak yang ditimbulkan. Kemiskinan dapat menyebabkan

lemahnya moral dan etika, pelanggaran hukum & Hak Asasi Manusia (HAM), kerusuhan, anarkisme, serta mudah masuknya ideologi selain Pancasila, menipisnya cinta tanah air dan bela negara, serta rapuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, masalah kemiskinanlah yang harus segera diselesaikan oleh negara Indonesia.¹

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, dimana masing-masing faktor saling berkaitan dan memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas). Rendahnya kualitas sumber daya manusia mengakibatkan kualitas kehidupan masyarakat yang rendah pula yang selanjutnya mengakibatkan rendahnya tingkat produktifitas masyarakat. Rendahnya produktifitas akan berakibat pada rendahnya pendapatan masyarakat, sehingga akumulasi tabungan masyarakat juga akan rendah.²

Penduduk miskin yang berada di sekitar garis kemiskinan akan bertambah sejalan dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, yang diakibatkan kenaikan harga BBM. Penduduk miskin seperti ini bisa saja ditolong dengan bantuan yang berasal dari kompensasi dana subsidi BBM, karena pada dasarnya mereka memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan memperbaiki kondisi ekonominya. Namun untuk penduduk miskin yang sangat parah, dana bantuan berupa subsidi ataupun transfer langsung tidak akan dapat membawa mereka keluar dari kemiskinan. Karena,

¹Manurung, *Bulletin YDS*, (Pematang Siantar, 1993), hlm. 3 diakses pada 02 Februari 2018 pukul 20:00

²Supriyanto, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Penanggulangan Kemiskinan", *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, No. 1, Vol. 3 (April, 2006), hlm.3

tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya, yaitu tidak adanya akses bagi masyarakat miskin terhadap faktor-faktor ekonomi sehingga sulit untuk merubah kondisi hidup mereka. Untuk itu pemerintah perlu secepatnya membuka akses faktor produksi bagi masyarakat miskin.³

Akan tetapi, bagi Pemerintah terutama Dinas Sosial, kemiskinan di Indonesia tak sekedar terjadi karena struktur dan budaya masyarakat. Kemiskinan juga tak hanya disebabkan oleh sulitnya masyarakat miskin mendapatkan akses sumber permodalan (faktor produksi). Lebih dari itu Dinas meyakini bahwa kemiskinan sangat erat kaitannya dengan persoalan keimanan dan ketakwaan masyarakat. Sebagaimana termaksud dalam surat Al A'raf Ayat 96 Berbunyi

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٩٦)

Artinya: “Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah

Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.⁴

Mengacu pada ayat tersebut dapat diambil satu pelajaran bahwa kunci sukses menggapai kehidupan di dunia adalah iman dan taqwa. Untuk itu pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan, khususnya di bidang ekonomi haruslah dimulai dari memberdayakan masyarakat.

³*Ibid*, hlm.10

⁴Departemen Agama, RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, hlm.163

Dinas Sosial adalah pelaksana Pemerintah Daerah di bidang sosial, yang menyangkut atau peduli dengan Masyarakat. Dalam melakukan salah satu programnya, Dinas Sosial melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan atau menaikkan ekonomi masyarakat menengah kebawah melalui Program Kementerian Sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Upaya dalam mengentaskan kemiskinan di dalamnya mengandung kegiatan yang produktif, seperti membuat Pelatihan dan Bimbingan Teknis membentuk suatu usaha, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Melihat latar belakang diatas disini penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi yang berjudul: **Peran Dinas Sosial Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Dinas Sosial berperan dalam memberdayakan masyarakat miskin di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan di desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai?

3. Bagaimana evaluasi pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian atau pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, penulis akan mencantumkan beberapa batasan sebagai berikut:

1. Peran diartikan sebagai pemain, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁵ Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tugas pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam memberdayakan masyarakat miskin di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemberdayaan, dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pemberdayaan yang berasal dari kata daya berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau tindakan (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagai berikut).⁶

Pemberdayaan menurut Ginanjar Kartasasmait pemberdayaan yaitu suatu upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang akan dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan dengan memperkuat potensi yang

⁵www.kbbi.web.id/peran, diakses pada 2018 13:30 Februari

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.

dimiliki oleh masyarakat.

Dalam pemberdayaan yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah pemberdayaan agar masyarakat bisa mengetahui pemanfaatan sumber daya yang ada di desa tersebut pada tahun 2017-2018 melalui Program Keluarga Harapan ini sehingga mereka tidak hanya berdiam di rumah dan masyarakat bisa merawatnya dengan baik dengan adanya pemberdayaan ini.

3. Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai⁷, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi social, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.

⁷P2 KP, *Pedoman Umum*, (Jakarta: 2004), hlm.1

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana Dinas Sosial berperan dalam memberdayakan masyarakat miskin di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan di desa Dame kecamatan Dolok Masihul kabupaten Serdang Bedagai?
3. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai?

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan berguna:

1. Sebagai bahan informasi bagi lembaga-lembaga yang berminat terhadap kegiatan-kegiatan tentang pemberdayaan masyarakat miskin.
2. Sebagai bahan pengembangan wawasan bagi para pembaca untuk meneliti hal yang sama di tempat yang sama atau pada tempat yang lainnya.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun yang menjadi sistematika pembahasan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang membahas tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan

Bab II Kajian Teori dan Kerangka Teori, yang membahas tentang: Pengertian Peran, Pengertian Pemberdayaan Masyarakat, Tujuan Pemberdayaan Masyarakat, Tahapan Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Pengertian Kemiskinan, Konsep Kemiskinan, Indikator Kemiskinan, Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan, Pengertian PKH (Program Keluarga Harapan).

Bab III Metodologi Penelitian, yang membahas tentang: Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV pemaparan berupa temuan hasil penelitian yang dilaksanakan. Hasil penelitian yang ada di dalam rumusan masalah dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial, untuk mengetahui apa saja peran, evaluasi dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh dinas sosial dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan yang bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan dan membentuk masyarakat yang sejahtera.

Bab V merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran yang meliputi beberapa kesimpulan penelitian dan hasil penelitian serta saran mengenai

peran Dinas Sosial dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

G. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka ada beberapa kajian terdahulu yang telah diteliti oleh beberapa orang yaitu: Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah Wati Dari Universitas Lampung Adalah Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Provinsi Lampung , Dan Masalah yang ditekan kan disini adalah bagaimna peran dinas sosial dalam Pembinaan dan Pelaksanaan bantuan sosial di Provinsi lampung dengan Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rafiuddin dari Universitas Sultan Ageng Tritayasa yaitu Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, Dimana penelitian ini berfokus pada Pekerjaan PKH baik itu dari segi SosialisasiProgram Keluarga Harapan, Proses Pendataan Penerima PKH dan Juga Proses Distribusi Dana PKH Kepada RTSM. Persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah sama sama membahas tentang Program Program dalam usaha penanggulangan kemiskinan baik itu melalui Program Keluarga Harapan (PKH) maupun (KUBE) Kelompok Usaha Bersama, sedangkan perbedaannya adalah penelitian kali ini lebih condong pada peran Dinas Sosial dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Kesejahteraan Sosial

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan. Baik yang tinggal di kota maupun di desa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan bathin. Namun, dalam perjalanannya kehidupan yang dijalani oleh manusia tidak selamanya dalam kondisi sejahtera.

Kesejahteraan Sosial adalah mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik, sedangkan menurut rumusan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1 adalah: “Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak hak asasi serta kewajiban manusia sesuai pancasila”.⁸

Menurut Walter A. Friedlander kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan

⁸Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014), hlm.119.

yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi juga sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan sepuh mungkin da meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani sepihak dan tanpa terorganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami masyarakat. Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direcanakan dengan matang dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada.

Hak hak dalam jaminan kesejahteraan sosial:

1. Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik baiknya (Pasal 1 UU No. 6 Tahun 1974)
2. Fakir miskin berhak mendapatkan pemeliharaan dari negara (Pasal 34 UUD 1945)
3. Fakir miskin berhak mendapatkan sarana bantuan sosial dan rehabilitasi sosial. (Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI no.42 Tahun 1981).

Keajiban-keajiban Dalam Jaminan Kesejahteraan Sosial:

1. Setiap warga negara ajib ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. (Pasal 1 UU no. 6 tahun 1974)
2. Pemerintah ajib mengusahakan sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat banyak.(Pasal 33 UUD 1945).

B. Peran

Kata peran dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti “pemain sandiwara”. Menurut Dougherty & Pritchard teori peran adalah memberikan sesuatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi, mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” lebih lanjut lagi mereka mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut. Sedangkan peranan seperangkat yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁹ Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Peranan juga diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. Peranan-peranan yang tepat yang dipelajari sebagai bagian dari proses sosialisasi dan kemudian diambil alih oleh para individu.¹⁰

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat yaitu merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat, peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang

⁹www.kbbi.web.id/peran, diakses pada 2018 13:30 Februari

¹⁰Soekanto Soerjano, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 212.

yang menduduki posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal diantaranya sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam dapat melakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku inndividu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹¹

Peran adalah satuan keteraturan perilaku yang diharapkan dari individu. Setiap hari, hampir semua orang harus berfungsi dalam banyak peran yang berbeda. Peran dalam diri seseorang ini sering menimbulkan konflik. Sebagai contoh, para dosen perempuan, diharapkan untuk mempersiapkan pengajaran filsafat di perkuliahan setiap hari sebagai kewajiban profesinya, namun di sisi lain ia pun bertanggung jawab sebagai istri dalam urusan keluarganya. Pada saat malam hari ia mengurus anak-anaknya di rumah serta keperluan rumah tangga lainnya, seperti mempersiapkan makanan untuk anak-anak dan suaminya, mengawasi anak-anaknya belajar, dan sebagainya. Inilah sering disebut sebagai peran ganda dan peran semacam itu hampir terjadi pada setiap profesi.

¹¹*Ibid.*, hlm. 213.

Dilihat dari jenisnya, menurut Linton, peranan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peran yang ditentukan atau diberikan (*ascribed*) dan peran yang di perjuangkan (*achived*). Peran yang ditentukan artinya peran-peran yang bukan merupakan hasil prestasi dirinya atau berkat usahanya, melainkan semata-mata karena pemberian orang lain¹².

Menurut Robbins yang dikutip oleh Dadang, peran adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan berkaitan dengan tugas seseorang dalam kedudukan pada satu unit sosial, begitu juga dengan Peran Dinas Sosial dalam menjalankan tugas atau wewenang yang di amanatkan untuk memberdayakan masyarakat miskin.

Menurut Newell yang dikutip oleh Dadang, menjelaskan bahwa peran adalah sama dengan perilaku dalam kedudukan tertentu dan mencakup perilaku itu sendiri dan sikap serta nilai yang melekat dalam perilaku.¹³

C. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial, yang bertujuan memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut berpartisipasi.

Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau

¹²Supardan Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 137-138.

¹³Syafaruddin, *Kepemimpinan Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Citapustaka Media, 2013), hlm. 59.

dikenal juga sebagai subjek. disini subjek merupakan penggerak, dan bukan penerima manfaat atau objek saja.

Menurut Sumaryadi pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi juga pada dasarnya sebagai berikut:¹⁴

1. Membantu pengembangan manusiawi dan autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum pemuda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasi/dikesampingkan.
2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pemndapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

¹³Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: CV.Citra Utama,2005), hlm 11

Menurut Suhendra defenisi pemberdayaan adalah satu kegiatan yang berkesinambungan secara dinamis, secara sinergi mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi.¹⁵

Sedangkan menurut widjaja Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabat nya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri , baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.¹⁶

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu kegiatan meningkatkan kekuasaan kepada masyarakat yang kurang mampu atau kurang beruntung secara berkesinambungan, dinamis, serta berupaya untuk membangun daya untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat agar ikut serta terlibat dalam mengelolah semua potensi yang ada secara produktif.

D. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Mardikanto terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Perbaikan kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

¹⁵Suhendra, *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 74-75

¹⁶Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Bulat dan utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 169

2. Perbaiki usaha (*better business*). Perbaiki pendidikan (semangat belajar), perbaiki aksesibilitas, kegiatan dan perbaiki kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
3. Perbaiki pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
4. Perbaiki lingkungan (*better environment*). Perbaiki pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. Perbaiki kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. Perbaiki masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.¹⁷

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Adapun penjelasan terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁷Mardikanto, *Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 202

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

2. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus

digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

4. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.¹⁸

E. Tahapan pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut.

Tahap Persiapan. Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

Tahapan pengkajian (*assessment*). Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

¹⁸Najiati Sri, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor: Wetlands International, 2005), hlm. 54

Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

Tahap pemformalisasi rencanaaksi. Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

Tahap pelaksanaan program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.

Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segeraberhenti.¹⁹

F. Strategi Pemberdayaan masyarakat

Terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sosial, yaitu tradisional, direct action (aksi langsung), dan transformasi yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Strategi tradisional. Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
2. Strategi direct-action. Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.
3. Strategi transformatif. Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.²⁰

¹⁹Soekanto Soerjono, *Sosial Suatu Pengantar*,(Jakarta: Rajawali press, 1987), hlm. 63

²⁰Hikmat Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), hlm. 45

G. Pengertian Kemiskinan

Pengertian Kemiskinan adalah Secara harfiah kamus besar Bahasa Indonesia, miskin itu berarti tidak berharta benda. Miskin juga berarti tidak mampu mengimbangi tingkat kebutuhan hidup standard dan tingkat penghasilan dan ekonominya rendah. Secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standard kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan²¹. Menurut Kuncoro, pengukuran kriteria garis kemiskinan di Indonesia diukur untuk kemiskinan absolut. Intuisi pemerintah yang biasa menetapkan kriteria garis kemiskinan yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan hendra Esmara mengukur dari ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar yang berlaku²².

Sedangkan Secara umum kemiskinan diartikan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau dasar. Mereka yang dikatakan berada di garis kemiskinan adalah apabila tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.

Istilah Kemiskinan selalu melekat dan begitu populer dalam masyarakat yang sedang berkembang. Istilah itu sangat mudah diucapkan tetapi begitu mudah untuk menentukan yang miskin itu yang bagaimana siapa yang tergolong penduduk miskin.

²¹www.kbbi.web.id/kemiskinan, diakses pada 03 juni 2018 13:34

²²http://mangihot.blogspot.com/2016/10/teori_kemiskinan.html diakses pada 23 Februari 2019 pukul 20.00

Untuk memberi pemahaman konseptual, akan dikemukakan dua pengertian kemiskinan, yaitu:

Secara kualitatif, definisi kemiskinan adalah suatu kondisi yang didalamnya hidup manusia tidak layak sebagai manusia, dan

Secara kuantitatif, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana hidup manusia serba kekurangan, atau dengan bahasa yang tidak lazim “tidak berharta benda”.²³

H. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah masyarakat. Kemiskinan sebagai fenomena sosial yang telah lama ada, berkembang sejalan dengan peradaban manusia. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga seringkali makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi tinggi. Substansi kemiskinan adalah kondisi deprivasi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan, papan, dan pendidikan dasar.

Kemiskinan juga sering disandingkan dengan kesenjangan, karena masalah kesenjangan mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan. Substansi kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Sudibyo mengatakan bahwa “apabila berbicara mengenai kemiskinan maka kemiskinan dinilai secara mutlak, sedangkan penilaian terhadap kesenjangan digunakan secara relatif”.

²³Mardimin Yohanes, *Krisis Proses Pembangunan di Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 20

Dalam suatu masyarakat mungkin tidak ada yang miskin, tapi kesenjangan masih dapat terjadi di dalam masyarakat tersebut.²⁴

Sebagian besar dari penduduk miskin ini tinggal diperdesaan dengan mata pencaharian pokok dibidang-bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional tersebut. Kehidupan mereka bergantung pada pola pertanian yang sub sistem, baik petani kecil ataupun buruh tani yang berpenghasilan rendah, ataupun bekerja dalam sektor jasa kecil-kecilan dan berpenghasilan pas-pasan. Fenomena banyaknya urbanisasi penduduk desa ke kota menunjukkan bahwa adanya ketidakmerataan pembangunan di perdesaan. Terbatasnya fasilitas umum, kecilnya pendapatan, dan terbatasnya pekerjaan dan dalih mencari kehidupan lebih baik menjadi alasan urbanisasi ini. Permasalahan tersebut menyiratkan adanya ketidakmerataan dan kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan.

Dalam konteks kemiskinan yang dialami sebagian besar penduduk perdesaan, kesenjangan terletak pada akses dibidang ekonomi. Keterbatasan akses ekonomi seperti pada faktor produksi telah menyebabkan seseorang tidak berdaya secara ekonomi. Adapun akses produksi itu adalah modal, lahan pertanian, pasar, sektor informal, pusat perdagangan dan sarana lain untuk melakukan aktivitas produktif. Dengan terbatasnya aksesibilitas ini menyebabkan pendapatan yang diperoleh terbatas, sehingga akan sulit bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan. Sulitnya akses terhadap sumber-sumber finansial terutama modal dalam berusaha,

²⁴ [http: Konsep Kemiskinan.html](http://KonsepKemiskinan.html), diakses pada 05 Juni 2018 pukul 20:00

menyebabkan penduduk miskin mencari sumber-sumber lain seperti rentenir, yang menyebabkan mereka semakin terpuruk dalam jurang kemiskinan.

I. Indikator kemiskinan

Indikator utama kemiskinan menurut BAPPENAS dapat dilihat dari; (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kuranya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas.

BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakara Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu kebutuhan gizi 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non-makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan. Model ini pada intinya membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan suatu garis kemiskinan (GK), yaitu jumlah rupiah untuk konsumsi per orang per bulan.

Sedangkan data yang digunakan adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas).

Dalam kehidupan masyarakat yang tergolong klarifikasi penduduk miskin berdasarkan kemampuannya memenuhi kebutuhan hidupnya, menurut Badan Pusat Statistik :

1. Penduduk dikatakan sangat miskin apabila kemampuan memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 900/kalori/orang/hari ditambah kebutuhan dasar atau setara dengan Rp. 120.000/orang/hari.
2. Penduduk dikatakan miskin apabila kemampuan memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai antara 1900/2100 kalori/orang/hari ditambah kebutuhan dasar atau setara dengan Rp. 120.000-Rp. 150.000/orang/bulan.
3. Penduduk dikatakan mendekati miskin apabila kemampuan memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 2100/23000 kalori/orang/hari dan kebutuhan dasar atau setara dengan Rp. 150.000-Rp. 175.000/orang/bulan.

Indikator-indikator Kemiskinan adalah ketidak mampuan untuk menaati norma yang berlaku dan ketidak mampuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi untuk hidup layak.

Tidak adanya kesempatan dan pilihan dasar untuk pembangunan manusia untuk manusia hidup panjang umur, sehat, kreatif dan menikmati standar hidup layak bebas bermartabat, percaya diri dan hormat pada orang lain.

J. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Faktor-Faktor penyebab kemiskinan secara umum:

1. Sikap dan pola pikir serta wawasan yang rendah, Malas berpikir dan bekerja,
2. Kurang keterampilan dan Pola hidup konsumtif,
3. Sikap apatis/egois/pesimis, dan Rendah diri,
4. Adanya perbedaan antara kaya dan miskin,
5. Belenggu adat dan kebiasaan, Adanya teknologi baru yang hanya menguntungkan kaum tertentu (kaya),
6. Adanya perusakan lingkungan hidup dan Pendidikan rendah.
7. Populasi penduduk yang tinggi , Pemborosan dan kurang menghargai waktu.
8. Kurang motivasi mengembangkan prestasi dan Kurang kerjasama.
9. Pengangguran dan sempitnya lapangan kerja dan Kesadaran politik dan hukum.
10. Tidak dapat memanfaatkan SDA dan SDM setempat, dan Kurangnya tenaga terampil bertumpun ke kota.
11. Faktor alam, lahan tidak subur/lahan sempit dan Keterampilan atau keterisolasi desa.
12. Sarana pehubungan tidak ada dan Kurang Fasilitas umum.

13. Langkanya modal, Tidak stabilnya harga hasil bumi dan Industrialisasi sangat minim.
14. Belum terjangkau media informasi dan Kurang berfungsinya lembaga-lembaga desa.
15. Kepemilikan tanah kurang pemerataan²⁵

K. PKH (Program Keluarga Harapan)

1. Pengertian PKH (Program Keluarga Harapan)

Program Keluarga Harapan yang biasa disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional ini dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara lain di dunia bukan hanya di Indonesia, terutama masalah kemiskinan kronis.

2. Manfaat PKH

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak-anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (FASKES) dan fasilitas layanan pendidikan (FASDIK) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup

²⁵Manurung, *Bulletin YDS*, (Pematang Siantar, 1993), hlm. 4-5 diakses pada 05 Juni 2018 pukul 20:00

penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Program prioritas nasional ini oleh Bank dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien gini. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat penerima keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Penguatan PKH dilakukan dengan melakukan penyempurnaan dengan proses bisnis, perluasan target dan penguatan program komplementer. Harus di pastikan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mendapat subsidi BPNT, jaminan sosial KIS, KKS, bantuan Rutilahu, pemberdayaan melalui KUBE termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih sejahtera.

3. Tujuan PKH

Misi besar PKH dalam menurunkan kemiskinan terlihat nyata semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2017 terjadi penurunan kemiskinan dari 10,64% pada bulan Maret 2017 menjadi 10,12% pada bulan September 2017 dari total penduduk atau 27.771.220 jiwa penduduk pada bulan Maret menjadi 26.582.990 jiwa penduduk pada bulan September dengan total penurunan penduduk miskin sebanyak 1.188.230 atau penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0.58% (BPS,2017).

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil / menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD /MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan dimulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH dibidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban dibidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH kesatuan pendidikan sesuai dengan

jenjang sekolah dasar dan menengah. KPM yang memiliki komponen kesejahteraan sosial berkewajiban memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan pangan lokal, dan perawatan kesehatan minimal satu kali dalam satu tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun, dan meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makanan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

4. Penyaluran Dana PKH

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh direktorat jaminan sosial keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun, bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : Nilai bantuan merujuk surat keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang indks dan komponen tentang bantuan sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Komponen dan indeks bantuan PKH pada tahun 2017, sebagai berikut :

- a. Bantuan Sosial PKH Rp.1.890.000
- b. Bantuan Lanjut Usia Rp.2.000.000
- c. Bantuan Penyandang Disabilitas Rp.2.000.000
- d. Bantuan Wilayah Papua dan Papua Barat Rp.2.000.000.²⁶

5. Komponen PKH

Dalam pengertian PKH jelas disebutkan bahwa komponen yang menjadi fokus utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan dan kesejahteraan sosial .

²⁶<http://www.pkh.kemensos.go.id>

tujuan utama PKH kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi masyarakat sangat miskin, melalui pemberian intensif untuk melakukan kunjungan yang bersifat preventif (pencegahan, dan bukan pengobatan).

Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 12 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga sangat miskin. Anak penerima PKH pendidikan yang berusia 7-21 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan 12 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang kurangnya 85% waktu tatap muka.

Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu program nasional maupun lokal. Bantuan PKH bukanlah pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup memebantu pengeluaran lainnya seperti seragam , buku, dan sebagainya.PKH merupakan bantuan agar orangtua dapat mengirim anak anak ke sekolah.

Rendahnya tingkat pendidikan seorang kepala keluarga menyebabkan penghasilan yang diperoleh juga rendah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan anak anaknya. Sementara jika kesehatan ibu hamil pada keluarga miskin tidak memadai maka kondidi kesehatan bayi yang dilahirkan akan tidak memadai pula. Akibatnya pertumbuhan anak keluarga miskin tidak memadai dan berdampak pada rendahnya kapasitas belajar anak.

Kondisi kemiskinan menyebabkan anak putus sekolah atau tidak mengenyam bangku sekolah sama sekali, bahkan ada yang harus mencari nafkah. Akhirnya kualitas generasi penerus keluarga miskin senantiasa rendah dan terjatuh pada lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu upaya meningkatkan kesehatan dan pendidikan rumah tangga sangat miskin harus terus dilakukan, sehingga dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

6. Lembaga Pendukung PKH

Dalam pelaksanaan PKH terdapat tim koordinasi yang memantau kelancaran program tingkat provinsi dan, dan PT.Pos yang bertugas menyampaikan informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan menyampaikan bantuan ke tangan penerima langsung.

Selain tim ini, juga terdapat lembaga lain yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan PKH, yaitu lembaga pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di tiap kecamatan dimana PKH dilaksanakan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Agar peneliti bisa mendapatkan data yang jelas dari informan. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tingkahlaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan menyeluruh²⁷. Subjek yang diteliti dalam hal ini adalah program pemberdayaan masyarakat miskin melalui PKH (Program Keluarga Harapan) di desa Dame kecamatan Dolok Masihul dan objek penelitiannya ialah masyarakat desa Dame kecamatan Dolok Masihul kabupaten Serdang Bedagai.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun Luas lokasi desa Dame Kecamatan Dolok Masihul ialah ± 45.000 m² untuk dapat menuju ke lokasi penelitian ini dapat menggunakan jalur darat dengan transportasi antara lain dengan bus dan sepeda motor.

²⁷Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 1993), hlm. 105

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang di peroleh langsung dari informan yang menjadi kepala desa Dame Kecamatan Dolok Masihul dan serta dari yang terkait dengan struktur dari perangkat Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dan kemudian tidak lupa juga adanya informan dari masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan

2. Data Skunder

Data skunder adalah data pelengkap atas data data yang memberikan keterangan atau informasi tambahan kepada peneliti sebagai bahan pelengkap penelitian seperti buku buku yang mendukung judul ini.

D. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan ini adalah sebanyak 4 orang yang berasal dari 2 orang dari pihak Dinas Sosial, 1 orang dari perangkat Desa Dame yaitu kepala desa Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul, 1 orang dari pekerja sosial (PKH) dan beberapa orang dari masyarakat sebagai penerima bantuan PKH dari Dinas Sosial bersangkutan. Diantaranya :

1. Nama : MISRAN, SE
Alamat : TELUK MENGGUDU
Usia : 48 Tahun
Jabatan : Kepala Dinas Sosial
Pendidikan terakhir : S1
2. Nama : FERNANDO SIAHAN
Alamat : DESA DAME
Usia : 45 Tahun
Jabatan : (KEPDES)
Pendidikan terakhir : SMA
3. Nama : Bapak Sualiman
Alamat : Perbaungan
Usia : 40 Tahun
Jabatan : (KOORDINATOR KABUPATEN)
Pendidikan terakhir : SMA
4. Nama : AHYARUDDIN FAHRI S.sos.I (PEKSOS)
Alamat : DESA DAME
Usia : 24 Tahun
Jabatan : (PEKSOS)

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi dengan pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).
2. Observasi, melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan dengan mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek aspek dalam fenomena tersebut²⁸. Adapun yang diamati dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak dinas sosial melalui PKH (program keluarga harapan) di desa Dame kecamatan Dolok masihul.
3. Dokumentasi, adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, peraturan peraturan, foto foto, film dokumenter, dan data data yang relevan.

F. Teknis Analisa Data Dan Keabsahan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka datanya dipaparkan dengan cara deskriptif. Setelah semua yang dibutuhkan terkumpul, maka selanjutnya penulis melakukan analisa terhadap data data tersebut. Untuk proses penganalisaan data, maka penganalisa melakukan analisa domain {domain analysis} maksudnya adalah peneliti

²⁸*Ibid.*, hlm. 143

hanya di targetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang di teliti tanpa harus merinci secara detail unsur unsur yang ada dalam keutuhan objek yang diteliti.

Menurut Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Ulber²⁹, kegiatan analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data penyajian data, penarikan kesimpulan /verifikasi.

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.
2. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik kesimpulan /verifikasi

Adapun teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi Burhan Bungin menjelaskan bahwa hal ini dapat dicapai dengan cara yaitu :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara .
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatan secara pribadi
3. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

²⁹Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 339

4. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, dan pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan³⁰

³⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 265

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Sosial Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin di Desa Dame

Berdasarkan Pasal 34 UUD 1945 “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” ini menegaskan bahwasanya negara memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Dinas sosial sebagai representasi pemerintahan di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia menjadi penyelenggara bantuan sosial dengan berdasarkan landasan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaannya³¹. Hal tersebut diperkuat oleh beberapa undang undang yang menjadi dasar program penanggulangan kemiskinan yang mana diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 (ayat 2) dan Pasal 28 Huruf H (ayat 3), Pasal 33 dan Pasal 34 (ayat 1 dan 2);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penangan Fakir Miskin;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;

³¹https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11_tahun_2009_uu.htm di akses pada tanggal 19 februari 2019 pukul 12.00 Wib

5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84/HKU/1997, tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Fakir Miskin;
6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 19/HUK/1998, tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat;

Dengan permasalahan kemiskinan , maka diperlukan penanggulangan yang dapat mengurangi penyandang fakir miskin. Kementrian Sosial RI memeberikan solusi berupa Pendekatan berbagai program yang mana salah satu diantaranya adalah program keluarga harapan (PKH) yang dijalankan oleh Dinas Sosial khusus nya di Kabupaten Serdang Bedagai. dalam hal untuk memberdayakan masyarakat miskin dinas sosial tidak hanya berfokus pada satu program ada banyak program program yang mana beberapa diantaranya adalah PKH, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan (UEP) Usaha Ekonomi Produktif yang di bentuk bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu agar bisa menjadi lebih baik. Untuk pelaksanaan pembangunan bidang di dalam kesejahteraan sosial maka Pemerintah Daerah Kabupaten telah membentuk Dinas Kesejahteraan Sosial yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial serta tugas tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan propinsi. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Kesejahteraan dan Sosial yang sesuai dengan peraturan gubernur Sumatera Utara no 17 tahun 2010 bahwa tugas pokok dinas kesejahteraan dan sosial Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi di

bidang potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, pelayanan sosial dan rehabilitasi Sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial serta tugas pembantu dan memiliki beberapa fungsi yaitu diantara nya :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial
3. Pelaksanaan pemberian izin dibidang kesejahteraan sosial
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial
5. Pelaksanaan tugas pembantu dibidang kesejahteraan sosial
6. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya³².

Dalam rangka pelaksanaan tugas Kesejahteraan Sosial khususnya penuntasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat miskin, belum dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena masih banyak kendala ataupun hambatan-hambatan guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.dengan tekad dan tujuan untuk memberdayakan masyarakat, menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan

³² Dinsos.sumutprov.go.id

kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang mampu. adapun Program-program tersebut sebagai berikut:

- a. Tahun 1974-1988, meliputi: Bidang pertanian (BIMAS, INMAS, KUK), transmigrasi, industri (industri padat karya, tekstil dan kayu lapis) dan berbagi kebijakan Inpres (Desa, Kabupaten, Propinsi, Jalan dan Irigasi).
- b. Tahun 1988-1998, meliputi: Pengembangan Kawasan Terpadu berupa Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT) dan program penanggulangan kemiskinan lainnya pasca krisis seperti padat karya.
- c. Tahun 1998-2006 program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat meliputi: Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan (P2KP) dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Pola pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan ini terkesan dilakukan secara parsial, sehingga menjadi tidak efektif untuk penanggulangan kemiskinan itu sendiri serta terdapat daerah-daerah yang memperoleh lebih dari dua program. Dan hal ini yang membuat saya ingin bertanya kepada bapak kepala dinas Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 22 oktober 2018, dari semua program yang sudah berjalan, apakah program yang paling efektif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Serdang Bedagai ini? Beliau menjawab “untuk saat ini program yang paling menonjol di setiap desa yang ada di Kabupaten Serdang bedagai ini

adalah Program Keluarga Harapan yang mana sasaran program ini adalah bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Usaha dan (KUBE) Kelompok Usaha Bersama”³³.

Dan hal ini di pertegas lagi oleh bapak Sulaiman selaku koordinator Kabupaten ketika saya bertanya pada waktu yang sama , apa peran dinas sosial dalam menjalankan program program ini? Beliau menjawab:

“Dinas Sosial berperan sebagai pengawas dan pengontrol dalam pelaksanaan program program ini”³⁴.

Dan pernyataan tentang program (KUBE) yang menjadi salah satu program yang efektif dalam memberdayakan masyarakat miskin di perjelas oleh UU No 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang mana pada pasal 2 BAB IV tentang pembangunan ekonomi, KUBE salah satu diantaranya yang mana, KUBE adalah suatu kelompok yang di bentuk warga atau keluargakeluarga binaan sosial yang terdiri dari orang-orang atau keluarga-keluarga yang kurang mampu atau (prasejahtera) yang menerima pelayanan sosial melalui kegiatan program pemberdayaan fakir miskin. Program KUBE ini mempunyai sasaran yaitu pada masyarakat miskin ataupun desa tertinggal dengan tujuan sebagai berikut:

1. Terciptanya sumber pendapatan bagi penduduk miskin didesa, melalui usaha-usaha penciptaan lapangan kerja produktif.

³³Wawancara dengan bapak Misran. Se selaku kepala Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai, *wawancara Pribadi*, 22 Oktober pukul 10:00 Wib

³⁴Wawancara dengan bapak Sulaiman selaku Koordinator Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai, *wawancara Pribadi*, 22 Oktober pukul 10:00 Wib

2. Berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat bersekala kecil dan menengah.
3. Meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan melalui peningkatan pendapatan.

Penerimaan Bantuan stimulan pemberdayaannya adalah para keluarganya sosial yang tergabung dalam KUBE, namun kondisi usaha ekonomi produktifnya mengalami hambatan atau kegagalan dan memerlukan bantuan tambahan modal usaha.

B. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Melalui Program Keluarga Harapan Di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

Sekilas tentang desa Dame, desa ini terletak di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai . Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada posisi $2^{\circ} 57''$ Lintang Utara, $3^{\circ} 16''$ Lintang Selatan, $98^{\circ} 33''$ - $99^{\circ} 27''$ Bujur Timur dengan ketinggian berkisar 0-500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Serdang Bedagai memiliki area seluas $1.900,22 \text{ Km}^2$ (190.022 Ha) yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 243 Desa/Kelurahan.

Secara administratif Kabupaten Serdang Bedagai berbatasan dengan beberapa daerah, yaitu :

- Sebelah Utara : Selat Malaka
- Sebelah Timur : Kabupaten Batu Bara dan Simalungun
- Sebelah Selatan : Kabupaten Simalungun
- Sebelah Barat : Kabupaten Deli Serdang

Ibu kota Kabupaten Sedang Bedagai terletak di Kecamatan Sei Rampah yaitu Kota Sei Rampah. Bila dilihat dari luas wilayah per Kecamatan berdasarkan jumlah 17 (tujuh belas) kecamatan, maka dapat dilihat Kecamatan Dolok Masihul mempunyai proporsi terluas 237.417 Km² (12,49 % dari luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai), sedangkan kecamatan yang paling kecil wilayahnya adalah Kecamatan Serbajadi dengan luas 50.690 Km² (2,67 % dari luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai). Kabupaten Serdang Bedagai juga merupakan jalur lintas sumatera yang berada di sisi pantai timur pulau sumatera. Kabupaten Serdang Bedagai merupakan jalur akses mobilitas dari atau ke Kota Medan, dari atau ke Kota Tebing Tinggi. Letak administrasi yang diapit oleh 2 kota tersebut merupakan faktor yang paling besar dalam menunjang perkembangan wilayah kabupaten Serdang Bedagai ,termasuk pada wilayah perdesaan salah satunya termasuk desa Dame, desa Dame ini di pimpin oleh seorang Kepala desa yaitu bapak Fernando Sihan yang mana desa ini memiliki luas wilayah sekitar $\pm 45.000 \text{ m}^2$ walaupun termasuk desa yang mempunyai luas wilayah yang tidak cukup luas desa ini termasuk salah satu desa dengan

perkembangan penduduk yang cukup besar dan sekarang terdapat 450 kepala keluarga di desa ini yang mana setiap keluarga rata rata memiliki 3 sampai 4 orang anak di desa ini 80% penduduknya adalah beragama kristen dan desa ini mempunyai 4 dusun yang mana setiap dusun di pipin oleh 1 orang kepala dusun dan desa ini bersebelahan dengan desa blok 10.

Sebagai salah satu program yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang selama ini melanda masyarakat yang di gulirkan oleh kementrian sosial, program keluarga harapan (PKH) merupakan program bantuan yang baik kontribusi sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan. Koordinasi PKH, komitmen kelembagaan baik pusat maupun provinsi dan daerah untuk mengoptimalkan koordinasi lintas sektoral guna meningkatkan hasil kinerja program sangat dibutuhkan. Koordinasi sangatlah penting didalam suatu program yang melibatkan beberraapa sektor, dengan koordinasi yang baik maka pengoptimalan dalam kinerja untuk suatau program sangat dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan dalam program itu. Masing masing pihak bersedia melaksanakan komitmen dan tanggung jawab bersama sama dan memendang kedepan tujuan akhir dari program ini, yaitu memutuskan rantai kemiskinan agar tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dapat tercapai. Berkaitan dengan program keluarga harapan (PKH), tujuan yang terdapat dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) ini sangat jelas. Adapun tujuan dari pelaksanaan PKH yaitu :

- a. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM.
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM

- c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anakdibawah 6 tahun dari RTSM
- d. Meningkatkan taraf hidup RTSM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial
- e. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- f. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian RTSM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
- g. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antara antara kelompok pendapatan.³⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses yang menjadi penentu pelaksanaan PKH di Desa Dame kecamatan Dolok Masihul salah satunya yaitu adanya langkah langkah persiapan pelaksanaan terlebih dahulu agar tujuan yang diinginkan tercapai. Proses persiapan pelaksanaan PKH meliputi proses persiapan pelaksanaan mulai dari pemilihan Kabupaten /Kota oleh BPS (Badan Pusat Statistik) penentuan lokasi penerima PKH dan penentuan peserta PKH. selain itu , dalam proses pengumpulan data dan informasi harus adanya kerja sama anatr satuan kerja terkait. Dengan adanya kerjasama antar satuan kerja terkait.dengan adanya kerjasama maka tujuan program akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

³⁵ Kementrian Sosial Republik Indonesia, Buku Kerja Pendamping PKH, (Jakarta:Kementrian Sosial RI, 2011), hlm. 1

Dari pencapaian rencana/tujuan yang sudah tersusun baik masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. Masih banyaknya balita yang kekurangan gizi, masih adanya ibu yang meninggal karena melahirkan, akses dan kualitas kesehatan dan pendidikan yang masih rendah menjadi penyebab hasil yang belum maksimal. Tujuan hanya akan tercapai jika pelaksanaan programnya dilakukan sebaik mungkin, sebisa mungkin dengan menekan adanya hambatan maupun kendala yang akan terjadi.

Berkaitan dengan pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai yaitu dengan membuat strategi dan melakukan sosialisasi. Adapun strategi pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana program yaitu dengan melakukan pertemuan awal oleh masyarakat penerima bantuan PKH ini. Pertemuan awal merupakan kegiatan pendamping untuk menginformasikan (sosialisasi) Program kepada RTSM peserta penerima bantuan PKH ini dan mendukung sosialisasi pada masyarakat umum. Langkah awal di dalam pertemuan, pendamping atau pelaksana program bantuan ini memilih ketua kelompok, dan hal ini dilengkapi lagi oleh abang Ahyaruddin Fahri S.sos.i selaku pendamping atau petugas dari Program Keluarga Harapan di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul saat saya melontarkan sebuah pertanyaan “ Siapa yang menentukan ketua kelompok dan apa kegunaan dari ketua kelompok”? dan beliau menjawab :

“Pemilihan ketua kelompok saya sendiri yang memilihnya dan mengelompokkan nya sesuai dengan jarak rumah dari masing masing penerima bantuan dari PKH ini, agar lebih mudah dan bisa saling komunikasi

satu sama lain apa bila terjadi masalah, dan adanya ketua kelompok untuk mempermudah komunikasi antara pendamping dan eserta penerima bantuan PKH ini, istilahnya sebagai perantara jika terjadi suatu masalah dan juga mempermudah pada saat pengambilan Uang bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH)”³⁶

Kemudian melakukan kunjungan rutin pada setiap RTSM yang dilakukan oleh pendamping, berdiskusi dalam kelompok adalah kegiatan yang tak kalah penting yang bertujuan untuk menyusun agenda dan mengadakan pertemuan dengan ketua kelompok ibu penerima bantuan PKH ini untuk berdiskusi dan menampung pengaduan, keluhan, perubahan status maupun menjawab pertanyaan seputar program. Dalam pertemuan ini tidak hanya membahas tentang program saja, dalam pertemuan ini juga dilakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan. Dan memantau kebutuhan sekolah maupun ibu hamil peserta PKH, dan juga memantau penggunaan kartu PKH agar sesuai dengan penggunaannya, pemutakhiran data dan sering mengadakan rapat koordinasi dengan peserta PKH. Dengan begitu pertemuan ini juga berlangsung untuk pendataan bagi peserta penerima bantuan PKH ini. Pemutakhiran data adalah perubahan data sebagian atau menyeluruh dari data awal sampai akhir. Contoh Pemutakhiran data meliputi:

1. Perubahan tempat tinggal
2. Kelahiran anggota keluarga

³⁶Wawancara dengan abangda Ahyaruddin Fahri selaku Pendamping PKH Desa Dame, “*Wawancara Pribadi*” Desa Dame 24 Oktober, pukul 14.00 Wib

3. Penarikan anak anak dari program (kematian, keluar/pindah sekolah, dan sebagainya)
4. Masuknya anak anak baru ke sekolah
5. Ibu hamil
6. Perbaikan nama atau dokumen dokumen
7. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses
8. Hal hal yang ditemukan di kemudian hari.³⁷

Pemutaakhiran data dilaporkan oleh peserta di UPPKH kecamatan. Pendamping PKH bekerja sama dengan ketua kelompok akan memeverifikasi perubahan data yang terkait. Seperti yang disampaikan oleh abang Ahyaruddin Fahri S.sos.i pada wawancara yang saya lakukan pada tanggal 24 oktober 2018 ketika saya bertanya “ bagaimana langkah langkah proses pemutaakhiiran data? Beliau menjawab :

” Proses pemutaakhiran data sebelum pencairan dengan cara mengupdate data kembali, setelah itu info perubahan komponen bisa dari pendamping langsung atau bertanya kepada ibu ibu atau ibu ibu anggota memberi info pada ketua kelompok yang nantinya disampaikan kepada pendamping”³⁸

Dengan sikap pendamping yang demikian, strategi dalam mensukseskan pelaksanaan PKH di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul dapat berjalan dengan

³⁷ Kementrian Sosial Republik Indonesia, Buku Kerja Pendamping PKH, (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2011), hlm. 17

³⁸ Wawancara dengan abangda Ahyaruddin Fahri selaku Pendamping PKH Desa Dame, “*Wawancara Pribadi*” Desa Dame 24 Oktober, pukul 14.00 Wib

baik. Sedangkan Proses sosialisasi yaitu dengan melakukan sosialisasi secara rutin dirumah ketua kelompok atau salah satu peserta PKH dengan satu atau dua orang pendamping sebagai pemberi arahan. Dengan melakukan musyawara bersama dan keikutsertaan atau partisipasi setiap peserta PKH maupun pendamping atau orang terkait dapat membeantu melancarkan pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan suatu program yang lebih utama adanya rasa semangat dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan program. Setiap aktor pelaksana harus dibekali dan harus memiliki semangat serta komitmen yang tinggi. Tingginya semangat dan komitmen dari aktor pelaksana program tersebut akan menimbulkan rasa ingin memberikan yang terbaik agar memperoleh hasil yang terbaik. Dengan begitu kendala kendala yang ada dalam sebuah pelaksanaan tentu bukan menjadi persoalan yang besar. Para pelaksana yang berkomitmen tentu akan berusaha agar kendala kendala terjadi sekecil mungkin bahkan tidak ada sama sekali.

Dalam pelaksanaannya, Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul ini yang menjadi sasaran utama adalah RTSM yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan yaitu ibu hamil, ibu menyusui, memiliki balita dan anak usia sekolah setingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, PKH dijalankan sebagai pelaksanaan dari UU NO. 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial nasional, UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, dan juga pada UU No. 3 tahun 2000 tentang rencana tindak percepatan pencapaian program rakyat, dan perpres No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. merujuk pada sistem jaminan Sosial Nasional

berdasarkan UU No. 40 tahun 2004 tersebut, PKH menjadi sebuah model jaminan yang unik. Dari data sisi PKH merupakan bantuan sosial yang dimaksudkan demi mempertahankan kehidupan dalam pemenuhan kebutuhan dasar terutama untuk RTSM dalam bidang pendidikan dan kesehatan.³⁹

Besarnya bantuan yang diberikan pada peserta PKH berdasarkan besarnya bantuan RTSM pada usia tertentu, rata-rata bantuan per RTSM, bantuan minimum per RTSM, serta bantuan maksimum per RTSM. Ada catatan penting bahwa untuk bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak dibawah umur 6 tahun dan ibu hamil/ ibu nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak.

Dalam setiap pelaksanaan suatu program yang menjadi salah satu unsur terpenting adalah pencapaian sebuah target. Dalam penelitian ini berdasarkan pernyataan dari pendamping berkaitan dengan hal tersebut target yang harus dicapai dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini yaitu terbentuknya masyarakat tidak mampu khususnya RTSM dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pendidikan seorang anak dan juga ibu hamil, lansia juga disabilitas. Peningkatan partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu target dalam pelaksanaan PKH ini. Untuk meningkatkan partisipasi para peserta program yaitu dengan meningkatkan angka partisipasi wajib belajar bagi peserta didik dan meningkatkan partisipasi kesehatan bagi para ibu hamil dan balita dengan memeriksakan keadaan kesehatannya di posyandu. Jika partisipasi masyarakat tinggi maka secara tidak

³⁹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sistem Informasi Manajemen PKH Kabupaten/ Kota, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2011), hlm. 1-3

langsung akan berpengaruh pula pada peningkatan kualitas hidupnya. Oleh karena itu dengan adanya partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PKH ini akan dapat meningkatkan pembangunan yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat miskin.

Hak peserta PKH adalah sebagai berikut:

1. Menerima bantuan uang tunai yang besarnya sesuai dengan ketentuan program
2. Menerima pelayanan kesehatan di puskesmas, posyandu dan lain lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Menerima pelayanan pendidikan sekolah selama 12 tahun pendidikan (SD-SMA).
4. Mendapatkan layanan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota keluarga sesuai dengan kebutuhan.
5. Terdaftar dan mendapatkan program program komplementer penanggulangan kemiskinan lainnya.⁴⁰

Adapun kewajiban peserta PKH yaitu:

Agar memperoleh bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak.

⁴⁰ Kementerian Sosial Republik Indonesia, Buku Kerja Pendamping PKH, (Jakarta:Kementerian Sosial RI, 2011), hlm. 3

1. Kesehatan

Fokus utama PKH bukan pengobatan (tanggung jawab Depkes), tetapi pencegahan pada ibu dan anak yang sehat.

Dukungan fasilitas kesehatan yaitu sebagai berikut:

- a. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan
- b. Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai
- c. Mempromosikan / mensosialisasikan pentingnya kesehatan
- d. Memberitahu jadwal kunjungan peserta
- e. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas
- f. Melakukan verifikasi terkait komitmen

Dan inti dari beberapa hal tersebut adalah PKH sebagai penyedia dan jaringan pemberi layanan kesehatan tersebut ialah :

1. Puskesmas
2. Bidan
3. Posyandu
4. Pusling
5. Pustu
6. Poskesdes

RTSM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

- a. Anak usia 0-11 bulan imunisasi lengkap serta pemeriksaan badan setiap bulan
- b. Usia 6-11 bulan mendapatkan suplemen vitamin A
- c. Usia 1-5 tahun imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan, setiap bulan
- d. Usia 5-6 tahun pemeriksaan berat badan setiap 1bulan dan mendapatkan vitamin A sebanyak 2 kali setahun
- e. Usia 6-7 tahun timbang badadn di faskes
- f. Pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak 4 kali dalam 3x trimester
- g. Melahirkan oleh tenaga kesehatan di faskes
- h. Pemeriksaan kesehatan 2 kali sebelum bayi usia 1 bulan.

2. Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan dan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan/ sekolah/ rumah singgah minimal 85% darihari sekolah selama tahun ajaran berlangsung. Peserta PKH wajib menyekolahkan anak mereka selama 12 tahun (SD-SMA).

3. Kesejahteraan Sosial

Layanan kesejahteraan sosial termasuk didalamnya lansia 17 tahun keatas dan penyandang disabilitas berat.Kewajiban lansia 70 tahun keatas adalah

pemeriksaan kesehatan yang mana dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas dan mengikuti kegiatan sosial.⁴¹

C. Evaluasi pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan Di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

Dalam membeberdayakan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan ini menghasilkan dampak yang cukup jelas bagi penerima bantuan PKH ini, yang mana dampak yang dihasilkan seperti halnya pada tingkat pendidikan, kesehatan dan Ekonomi. Pendidikan merupakan pilar penting dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Oleh karenanya pembangunan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan local, nasional, dan global. Salah satu upaya pemerintah untuk lebih menjamin dan mendukung berbagai kesepakatan internasional dalam bidang pendidikan adalah memasukkan komponen pendidikan dalam program PKH, karena upaya ini diharapkan akan mendorong warga miskin atau yang kurang mampu untuk lebih mementingkan pendidikan anak anaknya yakni menempuh pendidikan dari tingkat SD sampai dengan SMA sesuai dengan Program yang ada di dalam PKH.

Dan sebagai evaluasi dalam membeberdayakan masyarakat miskin melalui program keluarga harapan ini, saya mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan

⁴¹ Ibid, hlm. 2-6

dari bapak Fernando Siahn selaku kepala desa Desa dame Kecamatan Dolok Masihul pada tanggal 24 oktober 2018 ketika saya bertanya “Apakah Program Keluarga Harapan ini sudah efektif untuk membantu tingkatan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu”? dan beliau menjawab :

“Program Keluarga Harapan ini sudah sangat efektif dalam membantu meningkatkan tingkatan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu baik itu dari segi pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat, karena semenjak adanya Program PKH ini status pendidikan anak anak semakin meningkat dan orang tua yang kurang mampu tidak lagi harus memaksakan anak-anaknya untuk fokus bekerja membantu perekonomian keluarga melainkan bisa menyambi waktu untuk bekerja setelah pulang sekolah”.⁴²kemudian saya bertanya lagi pada beliau tentang “bagaimana kondisi atau tingkatan masyarakat sebelum program PKH ini ada? Beliau menjawab “kondisi dan tingkatan masyarakat disini bisa dikatakan menengah kebawah dari segi pendapatan ekonomi”⁴³Hasil yang sangat menonjol dari pemberdayaan melalui Program Keluarga Harapan ini dari segi pendidikan dan Peningkatan Ekonomi. Dari segi pendidikan yang mana anak anak dari keluarga miskin atau kurang mampu mendapatkan bantuan dana untuk menempuh pendidikan yang layak serta dapat mengenyam dan menyelesaikan pendidikan dari tingkat SD sampai SMA.dan dari bidang ekonomi setelah saya melakukan wawancara dengan ibu Yusniar Silalahi pada

⁴² Wawancara dengan bapak Fernando Siahn selaku Kepala Desa Dame, “*Wawancara Pribadi*” Desa Dame 24 Oktober, pukul 10.00

⁴³Wawancara dengan bapak Fernando Siahn selaku Kepala Desa Dame, “*Wawancara Pribadi*” Desa Dame 24 Oktober, pukul 10.00

tanggal 25 oktober 2018 selaku penerima bantuan dari PKH “selain untuk pendidikan bantuan PKH ini dapat di kelolah untuk apa saja?” saya mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan. “beliau menyatakan bahwa bantuan yang diberikan dapat di kelola menjadi usaha kecil-kecilan yang mana dari modal awal bisa diputar untuk memperoleh keuntungan dan menjadi pendapatan sehari-hari dari usaha penjualan sarapan pagi yang dia kelolah dia dapat membeantu perekonomian keluarga⁴⁴” dan saya bertanya lagi kepada ibu yusniar “apa pekerjaan suami ibu”? beliau menjawab: “pekerjaan suami saya hanya buruh kasar”⁴⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat terlihat bahwasanya dengan adanya program Keluarga harapan ini dapat membantu RTSM yang menerima bantuan untuk lebih ingin maju dan berkembang dengan fasilitas dan bantuan yg telah diberikan oleh PKH itu sendiri.dengan harapan dapat membantu tingkatan ekonomi masyarakat yang terbilang kurang mampu. Dan ini di perkuat oleh pernyataan dari ibu Rapida Sinaga pada tanggal 25 oktober 2018 kettika saya bertanya “apakah bantuan dari PKH ini dapat memenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan? Beliau menjawab: “iya bantuan dari PKH ini dapat memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak snya yang mana dari bantuan ini saya bisa membeli peralatan sekolah seperti baju, tas sekolah dan peralatan sekolah lainnya”.⁴⁶ kemudian saya masih bertanya lagi kepada

⁴⁴Wawancara dengan ibu Yusniar Silalahi selaku warga penerima bantuan PKH, “*Wawancara Pribadi*” Desa Dame 25 Oktober, pukul 14.00

⁴⁵Wawancara dengan ibu Yusniar Silalahi selaku warga penerima bantuan PKH, “*Wawancara Pribadi*” Desa Dame 25 Oktober, pukul 14.00

⁴⁶Wawancara dengan ibu Rapida Sinaga sebagai warga penerima bantuan PKH, “wawancara pribadi” pada tanggal 25 oktober 2018 pukul 14.00

beliau ‘berapakah jumlah anak yang ibu miliki yang masih menempuh pendidikan? Beliau menjawab:” anak saya 2 Masih SD dan 1 SMP”⁴⁷

Dengan adanya bantuan PKH ini memiliki dampak yang positif bagi seluruh RTSM yang menerima bantuannya , karena walaupun jumlah bantuan yang mereka terima tidak begitu banyak tetapi bantuan tersebut sangat membantu mereka dalam bidang apapun sesuai dengan keperluan masing masing RTSM.dan evaluasi yang dilakukan oleh setiap petugas PKH / pendamping PKH di terangkan oleh abangda Ahyaruddin Fahri ketika saya bertanya evaluasi apa lagi yang penting setelah berjalannya Program keluarga harapan ini yg bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu? Beliau menjawab : “Selain memantau dana yang tersalur yg diberikan oleh PKH baik itu dana yang digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan usah, pemberian arahan atau pengajaran juga menjadi hal yang terpenting di dalam melakukan evaluasi yang di lakukan setiap bulan nya.”⁴⁸dan kemudian saya bertanya lagi kepada beliau tentang “apa harapan abang untuk kedepan nya sebagai pendamping PKH bagi penerima PKH ini”? Beliau menjawab: “semoga dengan adanya bantuan dari PKH ini dapat membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa menjadi masyarakat yang lebih baik lagi terutama dari segi ekonomi dan pendidikan”⁴⁹

⁴⁷Wawancara dengan ibu Rapida Sinaga sebagai warga penerima bantuan PKH,”wawancara pribadi” pada tanggal 25 oktober 2018 pukul 14.00

⁴⁸ Wawancara dengan abangda Ahyaruddin Fahri selaku Pendamping PKH Desa Dame, “*Wawancara Pribadi*” Desa Dame 24 Oktober, pukul 14.00 Wib

⁴⁹Wawancara dengan abangda Ahyaruddin Fahri selaku Pendamping PKH Desa Dame, “*Wawancara Pribadi*” Desa Dame 24 Oktober, pukul 14.00 Wib

Tabel.1

Daftar Penerima PKH Desa Dame

NO	Nama	Alamat
1	Tiur Munthe	Dusun IV
2	Palentin Sirait	Dusun II
3	Tiorengsi Rajaguguk	Dusun II
4	Pasdellina Op Sunggu	Dusun II
5	Yusniar Silalahi	Dusun II
6	Nelly Pasaribu	Dusun I
7	Nursia Simbolon	Dusun I
8	Rapida Sinaga	Dusun II
9	Astiner RitaSimanjuntak	Dusun II
10	Mei Nurbeti Manurung	Dusun II
11	Meri Kristina Silaban	Dusun I
12	Rosnani Siregar	Dusun IV
13	Pangihutan Butar Butar	Dusun I
14	Evi Suraida Manik	Dusun II
15	Lisma Sihombing	Dusun III

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah saya lakukan yang bertempat di desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, mengenai Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Maka selaku penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Produktifitas yang dihasilkan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat miskin oleh Dinas Sosial sudah sangat baik, dimana peran dari Dinas Sosial sendiri yaitu dengan memberdayakan masyarakat miskin melalui pola. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH) dan program program yang lainnya dapat menghasilkan masyarakat yang mandiri dalam berkarya dan lebih memacu usahanya ke arah kemajuan dan perkembangan yang lebih baik lagi agar dapat mengembangkan diri menuju kesejahteraan sosial masyarakat yang sesungguhnya.
2. Kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial melalui program kesejahteraan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang kurang mampu cukup baik, karena apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat direspon baik oleh Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai. Dan untuk meminimalisir rasa tidak puas masyarakat akan program-program yang dijalankan, Dinas Kesejahteraan Sosial selalu berusaha menyerahkan

sepenuhnya kepada masyarakat apa yang terbaik, bermanfaat, berguna dan menguntungkan bagi masyarakat dalam musyawarah perencanaan program program dan pelaksanaannya.cara inilah yang memunculkan persepsi pada Masyarakat bahwa kualitas layanan Dinas Sosial terhadap masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Serdang Bedagai khususnya di Desa dame Kecamatan Dolok Masihul dalam menjalankan progam pemberdayaan masyarakat miskin cukup baik.

3. Dinas Sosial memiliki responsivitas yang bisa dikatakan cukup baik, ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan untuk mengenali apa yang menjadikebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Program-Program yang dinilai pengelolahannya cukup baik, namun masih memerlukan evaluasi yang benar agar bisa lebih baik lagi dalam memacu danmengembangkan program program yang sudah berjalan untuk lebih berkembang lagi.

B. Saran

Setelah mempelajari hasil dari penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan yang tentunya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang kemudian dapat bermanfaat dan berguna untuk meningkatkan peran maupun kinerja pengurus Dinas Sosial dalam menjalankan atau melaksanakan program Pemherdayaan Masyarakat Miskin. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Program-program yang sudah berjalan dan dianggap cukup baik oleh Dinas Kesejahteraan Sosial dan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai khususnya masyarakat Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul harus tetap dipertahankan dan lebih dikembangkan lagi.
2. Lebih memaksimalkan, keikhlasan hati dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan segala kegiatan yang menjadi tugas Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Selalu menjalin kerjasama antara pengurus dalam setiap menyusun, merencanakan dan melaksanakan program-program yang menjadi tugas yang ada di Dinas Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2001
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 1993
- Manurung, *Bulletin YDS*, Pematang Siantar, 1993
- Mardikanto, *Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, Bandung: Alfabeta, 2014
- P2 KP, *Pedoman Umum*, Jakarta: 2004
- Soerjano Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Soerjono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali press, 1987
- Sri Najati, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, Bogor: wetlands International, 2005
- Suhendra, *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2006
- Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: CV.Citra Utama, 2005
- Supriyanto, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Penanggulangan Kemiskinan”, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, No. 1, Vol. 3 (April, 2006)
- Syafaruddin, *Kepemimpinan Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Citapustaka Media, 2013.
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Bulat dan utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Yohanes Mardimin, *Krisis Proses Pembangunan di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1996

Departemen Agama, RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,

Departemen Pendidikan Nasional, KBBI Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

[https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11 tahun 2009 uu.htm](https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11_tahun_2009_uu.htm)

[http: Konsep Kemiskinan.html](http://KonsepKemiskinan.html), diakses pada 05 Juni 2018

[http://mangihot.blogspot.com/2016/10/teori kemiskinan.htm](http://mangihot.blogspot.com/2016/10/teori_kemiskinan.htm)

<http://www.pkh.kemensos.go.id>

www.bps.go.id

www.kbbi.web.id/kemiskinan, diakses pada 2018 13:34 Juni

www.kbbi.web.id/peran, diakses pada 2018 13:30 Februari

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah program yang paling efektif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Serdang Bedagai ini?
2. Apa peran dinas sosial dalam menjalankan program program ini?
3. Bagaimana langkah langkah proses pemutaakhiran data?
4. Apakah Program Keluarga Harapan ini sudah efektif untuk membantu tingkatan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu”?
5. apa pekerjaan suami ibu?
6. apakah bantuan dari PKH ini dapat memenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan?
7. selain untuk pendidikan bantuan PKH ini dapat di kelolah untuk apa saja?
8. berapakah jumlah anak yang ibu miliki yang masih menempuh pendidikan?
9. apakah bantuan dari PKH ini dapat memenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan?
10. bagaimana kondisi atau tingkatan masyarakat sebelum program PKH ini ada?
11. Evaluasi apa lagi yang penting setelah berjalannya Program keluarga harapan ini yg bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu?
12. apa harapan abang untuk kedepan nya sebagai pendamping PKH bagi penerima PKH ini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Muhammad Eko Permana Septian
TTL : Tebing Tinggi, 09 September 1995
Asal Daerah : Kota Tebing Tinggi
Alamat : Jln:Pala.Link:III.Kelurahan:Bandar Utama
No. HP : 083197754175

B. Pendidikan

Tahun 2001- 2008 : SDN 163081 Kota Tebing Tinggi
(Lulus dan Berijazah)
Tahun 2008- 2011 : MTS AL-HASYIMIYAH Kota Tebing Tinggi
(Lulus dan Berijazah)
Tahun 2011- 2014 : MA AL-HASYIMIYAH Kota Tebing Tinggi
(Lulus dan Berijazah)
Tahun 2014 - Sekarang : S1 UIN Sumatera Utara Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

C. Pengalaman Organisasi

1. Sekjen GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia) Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2018

Medan, 07 Februari 2019

**Muhammad Eko Permana Septian
NIM: 13.14.4.010**